

# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH ( RPJPD ) KABUPATEN BIMA TAHUN 2006 - 2025

## I. PENGANTAR

### A. Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yaitu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2025. RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dengan mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola potensi sumberdaya daerah dan mengacu kepada RPJP Nasional.

### B. Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat (1) menegaskan bahwa “Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional”. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Sesuai Pasal 9 UU 25/2004, penyusunan RPJPD dilakukan dengan urutan: penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda), dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

### C. Maksud dan Tujuan

Perencanaan pembangunan jangka panjang daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan serta dengan melibatkan seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Bima. Penyusunan RPJPD ini dimaksudkan untuk menentukan arah dan kebijakan daerah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

### D. Cakupan

RPJPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang mencakup gambaran potensi pembangunan dan faktor strategis sebagai dasar analisis perumusan visi dan misi serta arah pembangunan daerah sebagai dasar bagi perumusan agenda, kebijakan umum, dan sasaran pembangunan daerah.

## II. KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN POKOK

Bagian ini mendiskripsikan berbagai kondisi maupun hasil pelaksanaan pembangunan daerah sampai dengan kondisi tahun 2004. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian yang menyeluruh mengenai kondisi kekinian Kabupaten Bima sebagai dasar untuk memproyeksikan tujuan-tujuan maupun visi pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

### A. Kondisi Umum

#### 1. Aspek Fisik

- Wilayah Kabupaten Bima terletak di ujung timur Pulau Sumbawa, secara geografis berada pada 117°40" BT – 119°10" BT dan 70°30" LS dengan jumlah penduduk pada tahun 2004 sebanyak 407.664 jiwa dengan luas wilayah 437,465 Ha. Kabupaten Bima memiliki karakter fisik sebagai wilayah yang berbukit-bukit. Tata guna lahan terdiri dari lahan kering 60.253 Ha, lahan sawah 27.939 Ha, hutan 275.391 Ha, pemukiman dan lain-lain seluas 73.882 Ha. Luas lahan kritis bertambah menjadi 123.749,65 Ha pada tahun 2004 bila dibandingkan dengan tahun 2003 seluas 82.628,13 Ha.
- Penyediaan jaringan irigasi dan pengairan yang masih belum memadai akibat adanya beberapa bangunan irigasi yang belum dapat beroperasi secara maksimal karena tidak tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan bangunan irigasi.
- Panjang jalan yang ada di Kabupaten Bima pada tahun 2004 sepanjang 1337.88 km, dengan kondisi baik 36.52%, kondisi sedang 16.81%, kondisi rusak 13.94%, dan kondisi rusak berat 32.72%. Jaringan jalan yang tersedia masih belum sepenuhnya menghubungkan daerah terisolir ke pusat pemerintahan akibatnya masih terdapat beberapa kawasan tertinggal yang perlu mendapat perhatian pemerintah untuk pemerataan wilayah pembangunan.
- Pada aspek penataan ruang, sedang dilakukan penataan ruang secara menyeluruh melalui penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2005-2015. RTRW merupakan salah satu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kawasan Kabupaten Bima.
- Distorsi pengelolaan dan penggunaan lahan antara lain dengan terus meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian.
- Ketersediaan listrik tidak saja dimaksudkan untuk dipakai sebagai sumber penerangan, tetapi lebih dari itu dimaksudkan sebagai faktor pendorong peningkatan produktifitas kerja masyarakat. Ketersediaan listrik akan sangat mempengaruhi masyarakat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai aktivitas riil yang sekaligus bermanfaat bagi peningkatan tambahan penghasilan rumah tangga. Secara umum, jumlah rumah tangga yang menikmati dan memanfaatkan listrik sebagai sumber penerangan dan sebagai pendorong peningkatan aktifitas perekonomian dan aktifitas sosial lainnya sebanyak 69.953 unit. Hal ini kalau dikaitkan dengan jumlah rumah tangga yang ada yaitu sebesar 96.372 rumah tangga, maka yang belum terlayani adalah sebesar 35.186 rumah tangga atau sebesar 36.51%.
- Pemekaran wilayah kecamatan sebagai Ibu Kota Kabupaten yang baru adalah menjadi tantangan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 tahun ke depan. Hal ini penting untuk mengakselerasi laju perkembangan dan pembangunan wilayah regional yang sedemikian cepat.
- Pengembangan kawasan unggulan Kabupaten Bima yang teridentifikasi meliputi Kawasan Sentra Produksi (KSP) dan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) belum didorong secara optimal. Sejauh ini KSP

dan SWP masih diperlakukan sama dengan wilayah lainnya meskipun memiliki orde dan hirarki pelayanan yang berbeda.

## 2. Aspek Ekonomi

- Dilihat dari laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bima atas dasar harga konstan tahun 2000-2003 menurut lapangan usaha menunjukkan peningkatan yang cukup positif. Pada tahun 2000 laju pertumbuhan PDRB sebesar 3.41% menjadi 5.44 % pada tahun 2003 dengan dominasi pertumbuhan terbesar ada pada sektor pertanian yaitu sebesar 6.76%. Kendatipun perkembangan pembangunan perekonomian yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi cukup besar, namun kondisi tersebut belum mencirikan perkembangan pembangunan yang menggembirakan. Sebab, di Kabupaten Bima berdasarkan hasil Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk (PSEP) pada bulan Agustus-September 2005 masih terdapat 43.641 KK miskin (40,64 %) dari jumlah 107.384 KK. Kondisi ini menjadi sedemikian jelas dengan kenyataan bahwa perekonomian Kabupaten Bima masih didominasi oleh sektor pertanian dengan sistem usaha tani yang bersifat tradisional dan memiliki kecenderungan kuat sebagai pertanian sub-sistem. Akibatnya adalah rendahnya perolehan nilai tambah sektor pertanian yang berakibat pula pada rendahnya pendapatan per kapita penduduk dan terbatasnya kesempatan kerja dan lapangan usaha produktif. Berdasarkan data dari Disnakertrans sampai dengan bulan September 2005, dari jumlah angkatan kerja sebanyak 246.013 orang, 234.450 orang diantaranya sudah bekerja sedangkan sisanya 11.563 orang sebagai pencari kerja. Berdasarkan Bima Dalam Angka tahun 2003, terdapat 99.394 orang atau 48,79 % penduduk yang bekerja di sektor primer (pertanian) dengan pola pertanian tradisional, 86.396 orang atau 42,41 % penduduk yang bekerja di sektor sekunder melalui berbagai kegiatan usaha sekunder skala rumah tangga. Di sektor tersier terdapat 17.908 orang atau 8,80 % dengan pekerjaan utamanya pada sektor tersier informal.
- Keterbatasan penyediaan infrastruktur pembangunan yang memiliki pengaruh sangat besar dalam perkembangan pembangunan ekonomi produksi terutama pada beberapa kawasan yang menjadi sentra perekonomian rakyat.
- Lembaga ekonomi (koperasi dan lembaga keuangan mikro lainnya) saat ini sesungguhnya menjadi salah satu pelaku pembangunan yang perannya masih belum optimal dalam pengembangan perekonomian di perdesaan.
- Sebagai sektor dominan dalam ekonomi, sektor pertanian juga mampu menyerap tenaga kerja yang besar yaitu mencapai 48,79 %. Dalam konteks ini sub-sektor tanaman pangan masih merupakan andalan bagi perkembangan perekonomian masyarakat, dimana sebagian besar tenaga kerja terserap dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan dengan komoditi andalan padi, kedelai dan bawang merah. Pengalaman menunjukkan bahwa jika produk ketiga komoditi ini mengalami penurunan maka secara signifikan akan menurunkan pendapatan masyarakat secara umum pada periode yang bersangkutan.  
Komoditi pertanian tanaman pangan non-hortikultura, khususnya padi umumnya dikelola dengan sistem monokultur dan terlihat bahwa petani masih belum cukup memperhatikan tanaman lain yang potensial dan memiliki harga pasar yang lebih tinggi seperti kacang tanah dan jenis palawija lainnya. Tingkat produksi padi pada tahun 2003 adalah sebesar 210.497 ton dan meningkat menjadi 229.206 ton pada tahun 2004. Luas tanam komoditi padi adalah 48.804 Ha. Sedangkan komoditi kedelai, pada tahun 2003 jumlah produksi sebanyak 24.681 ton meningkat menjadi 30.150 ton pada tahun 2004. Komoditi kacang tanah masih relatif kecil

dengan nilai produksi 11.117 ton pada tahun 2003 meningkat menjadi 13.664 ton pada tahun 2004.

- Walaupun bawang merah menjadi komoditi andalan karena sudah cukup berhasil diekspor ke luar daerah, tetapi petani terkesan latah dalam melakukan penanaman tanpa memperhatikan pangsa pasar potensial yang ada. Komoditi ini pada awal musim harganya tinggi, tetapi pada waktu produksi melimpah harga turun drastis sehingga tidak jarang merugi. Demikian juga dalam hal budidaya, petani masih berorientasi pada kuantitas produksi dengan kualitas yang cenderung terabaikan. Hal ini menjadi salah satu kelemahan dari bawang merah produksi Kabupaten Bima adalah lebih cepat membusuk dibandingkan dengan bawang merah produk daerah lain. Ini diakibatkan oleh penggunaan pupuk Nitrogen yang berlebihan dalam proses pertumbuhan tanaman. Produksi bawang merah pada tahun 2003 sebesar 65.964 ton jumlahnya menurun pada tahun 2004 menjadi sebesar 51.051 ton. Tanaman-tanaman lain seperti mangga masih belum maksimal upaya pembudidayaannya, karena petani masih menfokuskan pada tanaman pangan yang semusim. Karena sejauh ini petani masih jarang melakukan diversifikasi (pengkombinasian) tanaman buah-buahan seperti mangga, jambu mete, dan lain-lain dalam satu lahan kebun.
- Potensi areal pengembangan untuk berbagai usaha perkebunan cukup luas yaitu 13.591,45 ha. Dari sisi kesesuaian lahan dan agroklimat, lahan yang tersedia berpotensi cukup baik untuk berbagai komoditi perkebunan seperti jambu mete, kelapa, kopi dan tembakau serta vanili. Belum maksimalnya pengembangan model pengelolaan perkebunan yang menyatu dengan pemukiman penduduk (agro estate).
- Peternakan merupakan salah satu sub sektor yang cukup baik perkembangannya di Kabupaten Bima terutama kerbau, sapi, kambing, dan unggas. Namun demikian, intensifikasi pemeliharaan, penanganan penyakit ternak dan budidaya pakan ternak masih perlu disebarluaskan kepada masyarakat guna menciptakan iklim peternakan yang baik.
- Potensi perikanan dan kelautan di Kabupaten Bima didukung oleh perairan pantai yang mencapai 9.455 Km<sup>2</sup>, sedangkan perairan ZEE seluas 8.682 Km<sup>2</sup>. Dari potensi perairan tersebut, terdapat potensi ikan yang beraneka ragam baik ikan potensi ekspor maupun lokal sebesar 48.233 ton/tahun.
- Sumber daya potensial lainnya adalah mutiara dan rumput laut. Produk mutiara mencapai 0,2 ton per tahun pada lokasi di Kecamatan Monta, Belo, Sape dan Sanggar di mana telah ada 3 perusahaan dan banyak kelompok plasma budidaya kerang mutiara. Sedangkan rumput laut produknya telah mencapai 13.500 ton lokasi budidaya tersebar pada beberapa lokasi terutama di teluk Waworada, Bajo Pulau dan teluk Bima. Sementara lokasi lain yang masih berpotensi untuk pengembangan rumput laut terdapat di perairan Wera/Ambalawi (Laut Flores).
- Potensi lain yang cukup berkembang adalah pertambakan udang windu/bandeng, dan garam rakyat, lokasi produksi dan pengembangan di Kecamatan Monta, Belo, Langgudu, Woha dan Sape. Budidaya laut seperti mutiara, rumput laut, dan budidaya ikan demersal belum berjalan dengan baik dan hasil yang diperoleh masih sedikit, karena kegiatan budidaya masih sampingan dan masih kurang mendapat perhatian masyarakat.
- Budidaya tambak udang maupun bandeng belum berhasil dengan baik, karena pengelolaan secara tradisional, di samping hal-hal lain yang berkaitan dengan bibit dan sarana produksi lainnya yang mahal. Budidaya ini memiliki potensi pengembangan lahan yang cukup besar. Berkaitan dengan hal itu, penyerapan tenaga kerja dari sektor ini sampai tahun 2003 hanya mencapai 24.440 orang (24,6 %). Angka ini memperlihatkan bahwa aktivitas masyarakat dalam pengolahan hasil masih kurang.

- Sumber daya tambang dan mineral baik golongan B maupun Golongan C di Kabupaten Bima cukup besar namun belum dikelola dengan baik. Misalnya marmer, batu gamping, mangaan, dan bahan galian golongan C lainnya. Sumber daya tambang Golongan B seperti emas, besi, pasir besi dan lainnya, belum dikelola sama sekali karena membutuhkan peralatan dan investasi awal yang besar. Kegiatan industri pertambangan khusus galian C, sampai dengan tahun 2003 cukup meningkat, seperti perusahaan genteng press/biasa, perusahaan kapur, penambangan (batu, pasir, dan pasir batu (sirtu) serta perusahaan marmer dan penambangan batu mangaan.
- Garam rakyat memiliki nilai potensial untuk dikembangkan lebih lanjut terletak pada Kecamatan Woha, Belo, dan Bolo. Khusus untuk garam beryodium, Kabupaten Bima memiliki satu perusahaan daerah, PD Wawo, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan bidang usaha ini. Produksi garam rakyat mampu menghasilkan sekitar 200.000 ton/tahun. Dari jumlah ini yang telah dikelola oleh PD. Wawo sekitar 15.000 ton/tahun. Sedangkan sisanya 185.000 ton/tahun belum dimanfaatkan. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi garam rakyat secara profesional diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Sektor perdagangan merupakan sektor yang sangat berperan dalam mendorong perkembangan perekonomian. Sektor ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua sektor terutama sektor pertanian, industri pengolahan dan kerajinan, dan industri pertambangan, karena merupakan bagian yang memproses pemasaran dari hasil-hasil yang diproduksi sektor-sektor tersebut. Penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan pada tahun 2003 mencapai 8,3 %. Angka ini termasuk sebagian besar dari usaha-usaha kecil yang masih dominan di Kabupaten Bima. Pertumbuhan sektor perdagangan di Kabupaten Bima, dari tahun ke tahun mengalami kemajuan yang berarti, walaupun dampak dari krisis moneter dan krisis ekonomi masih terasa sampai saat ini.
- Perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya antara kota dan desa yang tidak berimbang sehingga belum dapat mengembangkan kehidupan perekonomian di perdesaan.

### 3. Aspek Sosial Budaya

- Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bima terdiri dari : Angka atau indeks harapan hidup sebesar 64,70 tahun pada tahun 2003 meningkat menjadi 65 tahun pada tahun 2004. Angka kematian bayi mencapai 75 orang dan angka kematian ibu melahirkan 10 orang. Status gizi balita yang berpredikat gizi buruk sebesar 2.81 persen, gizi kurang sebesar 21,73 persen, dan gizi baik sebesar 74.21 persen dan gizi lebih sebesar 1,25 persen.
- Kinerja pembangunan pendidikan juga ditentukan oleh kemampuan literasi penduduk. Kondisi sampai dengan tahun 2003 ditunjukkan dengan gambaran bahwa penduduk usia 10 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya sebesar 82,16% sedangkan yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis atau buta huruf sebesar 17,84%. Data pada tahun 2004 Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD termasuk MI dan Paket A setara (usia 7-12 tahun) adalah 111.49%, untuk penduduk usia 13-15 tahun sebesar 82.65% (untuk siswa seluruhnya yaitu SMP, MTs, SMP Terbuka, dan Paket B Setara), dan untuk penduduk usia 16-18 tahun sebesar 61.63% (untuk siswa SMA, MA, SMK, dan Paket C Setara). Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD adalah 97.28%, tingkat SMP sebesar 79.46%, dan tingkat SMA sebesar 62.51%. Jumlah Drop Out (DO) untuk SD tidak termasuk MI dan Paket A setara (usia 7-12 tahun) adalah 2.691 (6,85%), SMP tidak termasuk MTs dan Paket C Setara (usia 13-15 tahun) adalah 419 (3,90%) sedangkan untuk SMA tidak termasuk MA dan Paket C

Setara (usia 16-18 tahun) adalah 53 (1,25%), sehingga total DO adalah 3.163 orang. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 6,37 tahun pada tahun 2000, meningkat menjadi 6,73 tahun pada tahun 2003. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bima pada tahun 2000 sebesar 60,58 meningkat menjadi 63,13 pada tahun 2003.

- Pembangunan pendidikan di Kabupaten Bima dapat dikatakan cukup menunjukkan perkembangan yang signifikan bagi rencana pengembangan kualitas SDM dengan tersedianya dana untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan dengan berbagai dana bantuan seperti Bank Dunia, ADB, DAK Non DR, dan lainnya.
- Untuk SD : Rasio Murid – Ruang Belajar sebesar 36,14 dan Siswa – Guru sebesar 28,84. Untuk SMP: Rasio Murid – Ruang Belajar sebesar 51,14 dan Siswa – Guru sebesar 28,48. Untuk SMA : Rasio Murid – Ruang Belajar sebesar 67,93 dan Siswa – Guru sebesar 27,14. Untuk SMK : Rasio Murid – Ruang Belajar sebesar 49,38 dan Siswa – Guru sebesar 59,26. Keadaan ini sudah cukup memadai walaupun ada beberapa sekolah dan ruang kelas yang masih perlu direhabilitasi dan dibangun baru. Sedangkan Rasio Murid – Guru masih belum mencukupi, terutama sebarannya di daerah terpencil. Selain itu, kualitas murid perlu mendapat perhatian melalui pengadaan buku paket serta pengadaan alat penunjang lainnya.
- Perkembangan pembangunan bidang kesejahteraan sosial ditandai dengan tingkat atau angka kemiskinan. Kondisi sampai dengan September 2005, jumlah penduduk miskin 43.643 KK miskin (46,64 %) dari jumlah 107.384 KK. Persoalan kemiskinan dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bima disebabkan oleh akumulasi berbagai kondisi yang saling terkait satu sama lain.
- Untuk mengukur daya beli penduduk antar wilayah propinsi atau kabupaten sebenarnya tersedia berbagai alternatif seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), rata-rata konsumsi rumah tangga yang dihitung dari PDRB menurut penggunaannya, rata-rata konsumsi dari Susenas ditimbang dengan Indeks Harga Konsumen (IHK), rata-rata konsumsi dari Susenas yang disesuaikan dengan indeks PPP. Hasil evaluasi yang pernah dilakukan BPS menunjukkan bahwa indikator yang dianggap paling baik untuk mengukur daya beli antar kabupaten dan propinsi adalah data konsumsi dari Susenas. Paritas daya beli Kabupaten Bima tahun 2000 sebesar Rp. 901.358 dan pada tahun 2003 sebesar Rp. 935.460.
- Kondisi dan jumlah penyandang cacat juga relatif besar serta gejala meningkatnya berbagai penyakit sosial mengakibatkan meningkatnya penyandang masalah sosial yang pada satu sisi mengancam berlangsungnya suatu tata kehidupan sosial yang baik (*good society*). Jumlah penyandang cacat dan masalah sosial adalah sebesar 53.632 orang. Sedangkan jumlah yang telah mendapat binaan dan fasilitasi dari pemerintah adalah 8.955 orang.
- Pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk untuk menciptakan pertumbuhan penduduk yang seimbang, dimana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari pada jumlah penduduk usia non-produktif. Sampai saat ini tingkat laju pertumbuhan penduduk adalah sebesar 1,26 % per tahun. Upaya pengendalian ini harus didukung oleh administrasi kependudukan yang tertata dengan baik.
- Pemberdayaan perempuan telah menunjukkan peningkatan yang ditandai dengan terbentuknya lembaga pemerintah yang khusus menangani masalah perempuan. Demikian pula partisipasi pemuda dalam pembangunan semakin meningkat dengan berbagai kegiatan kreatifitas seni budaya maupun olah raga yang dilakukan secara swadaya dengan dukungan dari pemerintah daerah yang masih tergolong terbatas dan minim.

- Masih tingginya tingkat konflik dan gangguan kantibmas. Tercatat 357 kasus gangguan Kantibmas terjadi selama tahun 2003.

#### 4. Aspek Kelembagaan

- Perubahan struktur SKPD lebih dilatarbelakangi oleh tuntutan untuk menggabungkan Satuan Kerja Vertikal dengan Satuan Kerja Horisontal. Implikasinya adalah jumlah pegawai dan beban belanja aparatur meningkat secara signifikan. Jumlah pegawai naik lebih dari 30% dalam periode tahun 1999 s/d 2002.
- SKPD Kabupaten Bima terdiri dari 17 Dinas dan 9 Lembaga Teknis termasuk RSUD dan Polisi Pamong Praja. Untuk memenuhi Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2003, SKPD tersebut perlu dikurangi minimal menjadi 10 (sepuluh) dinas, 4 (empat) badan, 3 (tiga) asisten, 3 (tiga) kantor, dan 12 bagian.
- Penetapan tupoksi sebenarnya sudah memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan. Namun, akibat struktur kelembagaan yang besar masih terjadi tumpang tindih (*overlapping sector*) antar SKPD terkait.
- Sistem pelayanan satu atap dalam pelayanan masyarakat sejauh ini perlu segera direalisasikan dengan didukung oleh pelimpahan sebagai kewenangan kepada kecamatan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mengingat kondisi geografis dan sebaran wilayah Kabupaten Bima yang luas dan menyebar.
- SKPD belum membangun mekanisme *check and balances* dengan konstituennya terhadap layanan publik yang diberikan. Secara konkrit setiap SKPD harus melakukan survey kepuasan konsumen dan membentuk unit pengelola pengaduan masyarakat terhadap pelayanan dan kinerjanya dalam pelayanan publik.
- Belum optimalnya mengupayakan langkah-langkah strategis untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Bima dalam rangka penyelesaian aset daerah.
- Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan semakin lajunya perubahan politik, ekonomi dan sosial, semakin menguatkan tuntutan supremasi hukum disegala bidang.

### B. Permasalahan Pokok

#### 1. Aspek Fisik

- Bertambahnya luas lahan kritis dan praktek illegal logging serta perladangan liar yang eskalasinya terus meningkat setiap tahun mengakibatkan luas hutan sudah sedemikian berkurang. Hal ini dapat diindikasikan dengan terjadinya degradasi kualitas lingkungan dan meluasnya lahan kritis dan rawan erosi, sumber-sumber mata air menjadi kering, sungai-sungai mengalami pendangkalan dan tidak berair serta curah hujan rendah. Pada sisi lain upaya-upaya pengendalian dan rehabilitasi lahan kritis dan kerusakan hutan juga belum menunjukkan hasil yang optimal karena belum dilaksanakan secara terintegrasi.
- Sejumlah kawasan pesisir pantai telah mengalami kerusakan yang cukup parah, antara lain disebabkan karena perilaku masyarakat yang kurang terkendali dan upaya-upaya penataan dan penanganan yang belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Pada masa mendatang, kawasan pesisir pantai yang merupakan salah satu potensi ekonomi yang sangat berarti perlu mendapat perhatian yang lebih serius.
- Pada aspek penataan ruang, belum dilakukan penataan ruang secara menyeluruh sehingga mengakibatkan banyak kawasan produktif belum direncanakan dengan baik. Ini merupakan suatu tantangan dalam melakukan penataan ruang secara menyeluruh yang terkait dengan

pemanfaatan kawasan produktif dalam rangka peningkatan produksi daerah dan produktifitas masyarakat.

- Aspek hukum dari penataan ruang perlu mendapat perhatian sehingga perilaku pemanfaatan ruang dapat dikendalikan dan diarahkan dengan baik. Sejauh ini dokumen tata ruang belum dijadikan rujukan yang berarti dalam proses penganggaran. Hal ini diakibatkan oleh pendekatan penyusunan rencana tata ruang yang tidak bermitra dengan masyarakat disamping sosialisasi dokumen tersebut yang masih kurang meluas.
- Terjadinya distorsi sistem kota-kota yang ditandai dengan menipisnya daya dukung wilayah,
- Berkurangnya produktifitas pertanian, meluasnya lahan kritis akibat penggundulan hutan, dan tidak semua lahan pertanian di wilayah Bima merupakan lahan subur.
- Belum adanya upaya untuk menggali lebih lanjut potensi sumber daya kelautan sebagai salah satu alternatif motor penggerak pengembangan ekonomi daerah.
- Lambatnya laju perkembangan dan pembangunan wilayah regional pada beberapa lokasi pemekaran wilayah kecamatan.
- Permasalahan dalam perbedaan pendekatan yang digunakan dalam penentuan konsep kawasan sentra produksi yang mampu menstimulasi pertumbuhan wilayah sekitarnya.
- Pertumbuhan pusat-pusat pengembangan wilayah tersebut masih diperlakukan sama dengan wilayah lainnya meskipun memiliki orde dan hirarki pelayanan yang lebih tinggi, yang diindikasikan dengan jumlah anggaran dan prioritas pembangunan yang ada dalam pusat SWP tersebut.
- Masih terdapat beberapa kawasan tertinggal yang belum memperoleh penyediaan tenaga listrik.

## 2. Aspek Ekonomi

- Belum optimalnya penanggulangan masalah kemiskinan.
- Perekonomian yang masih didominasi oleh sektor pertanian dengan sistem usaha tani yang bersifat tradisional dan memiliki kecenderungan kuat sebagai pertanian subsisten. Akibatnya adalah rendahnya perolehan nilai tambah sektor pertanian yang berakibat pula pada rendahnya pendapatan per kapita penduduk dan terbatasnya kesempatan kerja dan lapangan usaha produktif.
- Belum adanya upaya-upaya yang terarah dan berbasis teknologi untuk mendorong transformasi sistem usaha tani tradisional ke sistem usaha tani yang efektif dan efisien, serta meningkatkan investasi pada usaha ekonomi rakyat untuk menciptakan aktifitas ekonomi yang terdiversifikasi dengan baik.
- Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur pembangunan ekonomi dan kurang berkembangnya aspek kelembagaan ekonomi yang sudah ada di masyarakat karena kurangnya minat, perhatian dalam memahami manajemen usaha dan pengembangan modal usaha.
- Perilaku petani yang sering kurang memperhatikan teori ekonomi seperti *supply-demand* dan kondisi pemasaran produk hasil tani.
- Belum maksimalnya pengembangan tanaman-tanaman lain seperti mangga karena petani masih menfokuskan pada tanaman pangan yang semusim.
- Penanganan penyakit ternak dan budidaya pakan ternak masih perlu disebarluaskan kepada masyarakat guna menciptakan iklim peternakan yang baik.



- Pengelolaan potensi sumberdaya kelautan yang masih dilaksanakan secara tradisional dan tidak ramah lingkungan seperti pengelolaan mutiara, rumput laut, udang windu, bandeng, dan lainnya sehingga belum memberikan nilai ekonomis yang menguntungkan masyarakat.
- Rendahnya aktifitas masyarakat dalam pengolahan hasil masih kurang.
- Belum adanya upaya untuk mengelola sumber daya tambang dan mineral baik golongan B maupun golongan C seperti marmer, mangan, batu gamping, emas, besi, pasir besi dan lainnya, akibat tidak tersedianya peralatan, teknologi, dan investasi awal yang besar.
- Retribusi perdagangan antar pulau yang menghambat arus transportasi, distribusi, dan pemasaran hasil pertanian. Kendala ini juga berdampak pada kenaikan harga dan kualitas hasil produksi yang masih rendah.
- Tidak maksimalnya penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan.
- Terbatasnya akses pasar bagi beberapa komoditi lokal dan rendahnya kualitas produk pertanian daerah.
- Terjadinya distorsi perdagangan antar daerah atau secara spesifik antara kota dan desa. Interaksi antara kota dan desa yang masih tidak berimbang, dimana kota (core) memasarkan produk-produknya ke desa (hinterland) tanpa disertai aliran modal masuk dari kota ke desa.

### 3. Aspek Sosial Budaya

- Penyebaran tenaga medis dan paramedis yang belum menjangkau seluruh wilayah pedesaan. Kondisi semacam ini menjadikan layanan kesehatan bagi masyarakat belum optimal serta terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap prasarana kesehatan yang diperlukan.
- Kinerja peningkatan kualitas pendidikan yang belum optimal.
- Rendahnya kemampuan membiayai pendidikan, distribusi tenaga pendidikan yang tidak merata, dan kurangnya kesempatan mengenyam pendidikan tinggi.
- Tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah akibat rendahnya pendapatan per kapita.
- Gejala meningkatnya berbagai penyakit sosial mengakibatkan meningkatnya penyandang masalah sosial yang mengancam berlangsungnya suatu tata kehidupan sosial yang baik (*good society*) dan menghambat proses transformasi sosial.
- Pola penyebaran penduduk yang tidak seimbang pada beberapa daerah di Kabupaten Bima.
- Kualitas tenaga kerja pada berbagai aspek ketenagakerjaan masih rendah.
- Masih maraknya kegiatan masyarakat yang mengarah pada terjadinya degradasi lingkungan.
- Masih rentannya gangguan Kamtibmas akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat.
- Transformasi budaya luar yang bertentangan dengan nilai budaya lokal semakin mudah terjadi.

### 4. Aspek Kelembagaan

- Kinerja organisasi perangkat daerah belum efektif dan efisien.
- Penetapan tupoksi masing-masing SKPD masih tumpang tindih (*overlapping sector*) antar SKPD terkait.
- Belum terealisasinya sistem pelayanan satu atap dalam pelayanan masyarakat dan tidak adanya pemberian kewenangan kepada kecamatan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
- Belum terlaksananya unit pengelola pengaduan SKPD terhadap layanan publik.

- Belum optimalnya pelaksanaan prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD.
- Kurangnya kerjasama antar wilayah pemerintahan yang berbeda dalam mengembangkan potensi daerah.
- Belum tersedianya petunjuk teknis dan masih belum optimalnya sosialisasi yang terkait dengan beberapa Perda.
- Belum optimalnya upaya pengembangan kapasitas daerah dan kompetensi aparatur untuk memenuhi tugas dan kewenangan daerah.

### III. ANALISA POTENSI DAN FAKTOR STRATEGIS

#### A. Potensi Pembangunan

Potensi pembangunan merupakan aspek mendasar yang perlu dikembangkan untuk menghadapi tantangan pembangunan daerah dalam kurun waktu mendatang. Uraian mengenai potensi pembangunan daerah dapat dilihat sebagai berikut:

##### 1. Aspek Fisik

- Letak geografis Kabupaten Bima yang strategis pada alur perdagangan kawasan timur Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang yang menghubungkan Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan serta menjadi wilayah penyangga (buffer zone) untuk kawasan NTT bagian barat.
- Peruntukan lahan untuk kegiatan pertanian yang cukup luas, baik pertanian lahan basah maupun lahan kering perlu dikelola secara lebih optimal untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat.

##### 2. Aspek Ekonomi

- Potensi kekayaan alam seperti potensi sumberdaya hutan, lahan, air, tambang, perikanan dan kelautan yang terdapat di daerah perlu dimanfaatkan secara bijaksana untuk kemakmuran masyarakat.
- Tersedianya lembaga ekonomi terutama di tingkat desa yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang usaha ekonomi produktif bagi masyarakat.
- Potensi ekonomi daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dari struktur perdagangan adalah ketersediaan hasil-hasil pertanian rakyat unggulan dalam kuantitas yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan.
- Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kelancaran proses perdagangan antar wilayah dan antar daerah seperti tersedianya fasilitas transportasi darat, laut, dan udara.

##### 3. Aspek Sosial Budaya

- Tersedianya sumberdaya manusia dalam segi kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah.
- Keinginan yang kuat untuk maju dan bersaing dengan daerah lain.

##### 4. Aspek Kelembagaan

- Otonomi daerah memberikan peluang kepada daerah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

#### B. Analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan

##### 1. Aspek Fisik

###### a. Kekuatan

- Letak geografis yang sangat strategis menghubungkan pusat-pusat perdagangan antara kawasan barat dan timur.
- Tersedianya potensi SDA yang perlu dioptimalkan pemanfaatannya.

###### b. Kelemahan

- Masih terdapatnya beberapa kawasan terisolir dan tertinggal.
- Terbatasnya investasi bagi pemanfaatan potensi SDA.
- Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung percepatan pembangunan daerah pada berbagai wilayah dan sektor.

- Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan.
  - Kondisi sanitasi dan air bersih di beberapa lingkungan permukiman yang masih memprihatinkan.
  - Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan sarana dan prasarana daerah.
- c. Peluang
- UU 32/2004 memungkinkan Pemerintah Daerah untuk menggali potensi daerah secara berkelanjutan.
  - Kompetisi antar wilayah dan daerah yang semakin kompetitif dalam penyediaan sarana dan prasarana.
- d. Tantangan
- Terbatasnya penyediaan perangkat lunak dan keras yang mendukung peningkatan iklim investasi.
2. Aspek Ekonomi
- a. Kekuatan
- Tersedianya potensi pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan mikro di tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten dalam menyediakan kebutuhan modal kerja yang mendorong produktifitas ekonomi.
  - Tersedianya potensi SDA dan SDM untuk pengembangan perekonomian daerah.
  - Kemauan yang kuat dalam meningkatkan usaha perekonomian daerah.  
Kabupaten Bima merupakan pusat perdagangan pada kawasan trans Nusa Tenggara dan perdagangan antar wilayah.
- b. Kelemahan
- Kurang meratanya ketersediaan SDM yang handal dalam memaksimalkan pengelolaan potensi SDA dan pengembangan ekonomi daerah.
  - Terbatasnya perangkat teknologi dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi pembangunan daerah.
  - Pengelolaan usaha ekonomi masyarakat yang masih bersifat tradisional.
- c. Peluang
- UU 33/2004 sebagai landasan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumberdaya keuangan daerah secara efektif, transparan, dan komprehensif.
  - Adanya keberpihakan dan desentralisasi ekonomi dari pemerintah pusat yang memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan potensi SDM dan SDA daerah.
  - Adanya peluang dan prospektif pasar dalam negeri maupun luar negeri untuk produk – produk unggulan daerah.
- d. Tantangan
- Penanaman modal (investasi) pada sektor-sektor strategis dan potensial daerah masih rendah.
  - Kualitas produk daerah memiliki daya saing yang rendah.
3. Aspek Sosial Budaya
- a. Kekuatan
- Jumlah penduduk usia produktif yang cukup banyak merupakan kekuatan untuk memobilisasi potensi daerah secara optimal.

- Secara historis, Bima merupakan daerah kesultanan sehingga dijadikan asset untuk pengembangan potensi pariwisata dan seni budaya.
  - Penduduk Bima yang bermayoritas Islam merupakan asset bagi daerah dalam mengembangkan kondisi sosial budaya yang lebih baik
- b. Kelemahan
- Distribusi tenaga pendidik yang tidak merata
  - Distribusi penduduk yang tidak merata
  - Rendahnya kualitas SDM sehingga mengakibatkan rendahnya produktifitas dan terbatasnya kegiatan perekonomian
  - Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum memadai
  - Terbatasnya tenaga medis
  - Tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan
  - Gejala meningkatnya penyakit sosial pada masyarakat
  - Maraknya kegiatan masyarakat yang mengarah pada terjadinya degradasi lingkungan
  - Rentannya gangguan terhadap Kamtibmas akibat rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa aman dan ketertiban lingkungan.
  - Menurunnya pemahaman generasi muda terhadap filosofi nilai kearifan budaya lokal.
  - Rentannya budaya lokal yang menyebabkan mudahnya infiltrasi budaya luar.
  - Etos kerja yang relatif rendah.
- c. Peluang
- Kebijakan pemerintah pusat yang memprioritaskan arah pembiayaan pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
  - Keberpihakan pemerintah daerah yang memberi ruang berkembangnya budaya tradisional.
  - Arah Kebijakan pembangunan pemerintah pusat yang menjadikan potensi sosial budaya sebagai salah sektor penerimaan daerah.
- d. Tantangan
- Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya yang lebih baik.
  - Situasi politik dan keamanan nasional yang belum sepenuhnya kondusif.
4. Kelembagaan
- a. Kekuatan
- Ketersedian instrumen interaksi lembaga pemerintah dan non pemerintah yang secara sinergis salingmendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
  - Adanya struktur, tugas pokok, dan fungsi masing–masing SKPD yang jelas.
  - Adanya produk–produk peraturan daerah yang mendasari pemerintah daerah dalam melakukan penataan kelembagaan daerah.
- b. Kelemahan
- Kinerja, kreatifitas, dan profesionalisme pegawai Pemda yang belum optimal.

- Tumpang tindihnya penetapan tugas pokok dan fungsi antar SKPD yang ada di daerah.
- Kemampuan lembaga pemerintahan dalam koordinasi, kerjasama, dan pelayanan publik masih terbatas.
- Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk pembiayaan pembangunan.

c. Peluang

- PP 8/2003 memungkinkan terbentuknya struktur organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien.
- Penerapan nilai demokrasi dan prinsip-prinsip *good governance* memungkinkan terbentuknya sistem pemerintahan yang transparan, demokratis, dan akuntabel.
- UU 32/2004 memberi ruang yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan fungsi-fungsinya.

d. Tantangan

- Pengalokasian keuangan pusat terhadap daerah belum proporsional.
- Pemberdayaan lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk meningkatkan kinerja masing-masing sesuai bidang kewenangannya.
- Era globalisasi yang menuntut dinamika masyarakat untuk bergerak maju membutuhkan strategi tersendiri.
- Penerapan sistem anggaran surplus-defisit.

C. Faktor Strategis

Faktor strategis untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa aspek berikut ini:

1. Aspek Fisik

Ketersediaan potensi lahan dan sumberdaya alam yang sangat potensial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun dalam pemanfaatannya belum didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang memadai selain faktor ketersediaan dan pemanfaatan teknologi yang masih sangat terbatas. Namun demikian hal ini menjadi salah satu faktor yang memberikan jaminan bagi berlangsungnya pembangunan secara berkelanjutan.

2. Aspek Ekonomi

Dominasi sektor pertanian memberikan jaminan akan kemampuan daerah untuk tetap mampu bertahan dalam situasi krisis berdasarkan data Bima Dalam Angka Tahun 2003, sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu 6.76% dalam laju pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan. Namun, keterbatasan akses masyarakat tani terhadap sumber-sumber informasi pasar seperti harga jual produk, musim tanam di daerah lain, dan kebutuhan pasar akan suatu produk, mempengaruhi proses pemasaran produk pertanian daerah. Dengan mengetahui informasi pasar secara berkesinambungan, diharapkan agar daerah dapat menciptakan suatu peluang untuk menghasilkan produk yang memiliki daya jual tinggi. Selain itu, nilai tambah dan kontinuitas produk daerah belum dioptimalkan untuk memaksimalkan pemasaran produk.

Iklim investasi yang cukup memadai dalam menggerakkan perekonomian daerah memberikan kontribusi yang positif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3. Aspek Sosial Budaya

Nilai-nilai budaya lokal, etos kerja, dan keinginan yang kuat dari masyarakat untuk maju dan berkembang seperti daerah-daerah lain di Indonesia merupakan salah satu faktor strategis yang mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Tingkat partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan mulai menunjukkan peningkatan yang berarti seiring dengan tumbuhnya iklim demokratisasi.

4. Aspek Kelembagaan

UU 32/2004 memberikan kewenangan lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk menggali, mengelola, dan memanfaatkan potensi daerah secara berkelanjutan termasuk penataan aspek-aspek kelembagaan satuan kerja perangkat daerah untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Lembaga-lembaga ekonomi, sosial, dan budaya yang ada perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menunjang aktifitas pembangunan fisik-materiil dan mental-spiritual. Penataan kelembagaan ini perlu didukung juga oleh penegakan supremasi hukum yang mampu menjamin kepastian hukum bagi pata pelaku pembangunan daerah.

#### IV. VISI dan MISI

Membangun visi dan arah pembangunan Kabupaten Bima harus dilandasi oleh pemahaman yang jelas dan menyeluruh tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Visi dan arah pembangunan yang dibangun harus dapat mendorong perbaikan kesejahteraan dengan memberdayakan masyarakat melalui transformasi dan peningkatan peran-peran lembaga pemerintah, DPRD, lembaga sosial kemasyarakatan, dan dunia usaha.

Dalam perspektif desentralisasi, RPJPD merupakan salah satu wujud aktualisasi kewenangan Pemerintahan Daerah untuk mengartikulasikan tujuan dan dimensi penting dalam pembangunan. Oleh karena itu, masyarakat harus diletakkan sebagai komunitas yang tidak saja sebagai penerima makna, tetapi lebih dari itu sebagai pemberi dan pengisi makna itu sendiri. Artinya bahwa masyarakat harus diberikan peran khusus melalui kelembagaan sosial, budaya, dan ekonomi yang permanen untuk melakukan aktivitas pembangunan berdasarkan inisiatif sendiri.

Disamping itu, tafsir otonomi yang mengedepankan RPJPD sebagai kerangka kerja pemerintahan daerah dalam arti luas memiliki makna keberlanjutan dan bagian kaji ulang dari berbagai capaian pembangunan tahap sebelumnya. Persuasi perencanaan ini penting untuk dipahami oleh semua pelaku pembangunan karena sejumlah capaian pembangunan yang telah ada merupakan akumulasi keberhasilan semua komponen masyarakat, dan karena itu masih dibutuhkan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih baik terutama berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya yang kurang efisien dan efektif.

Sebagai kerangka kerja jangka panjang, RPJPD dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu : sebagai bagian dan merupakan penjabaran dari pembangunan secara keseluruhan baik yang bersifat regional NTB maupun yang bersifat nasional, dan sebagai salah satu bentuk pengembangan dari kepentingan pembangunan di daerah Kabupaten Bima itu sendiri. Kedua sudut pandang ini tidak dapat dipisahkan tetapi bersifat komplementer atau saling melengkapi. Oleh karena itu, maka baik pembangunan daerah, regional maupun nasional berada dalam tataran berpikir yang sama. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup baik yang berpautan dengan rencana maupun pelaksanaannya yang didasarkan pada skala prioritas, isu-isu strategis, dan kemampuan fiskal. Secara substansial, sifat komplementer tersebut dapat dilihat dari keterkaitan antara Agenda Pembangunan.

Pada dasarnya, perencanaan pembangunan daerah dipengaruhi oleh pelbagai perubahan kondisi fisik, ekonomi, sosial dan kelembagaan. Secara keseluruhan kondisi ini harus dapat merespon pelbagai koreksi, pembetulan, dan bahkan pelurusan terhadap pelbagai hal agar benar-benar sesuai dengan kehendak, kebutuhan dan kehidupan masyarakat. Karena itu, tugas dan fungsi pemerintah di bidang perencanaan perlu disesuaikan dengan format perencanaan yang benar-benar dapat menjawab dan menyelesaikan tuntutan, kebutuhan, dan kehidupan masyarakat. Banyak aspek dalam perencanaan pembangunan yang perlu dibenahi dan dikembalikan ke format perencanaan pembangunan yang bersifat memecahkan masalah. Formulasi RPJP ini mencoba mengkristalisasikan upaya pemecahan masalah tersebut.



## A. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Bima sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan adalah:

**“Kabupaten Bima yang Maju, Sejahtera, Mandiri, Bermartabat, dan Religius melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Pembangunan Pertanian Berkelanjutan, dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan”**

Dengan rumusan visi tersebut di atas, dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, diharapkan kondisi Kabupaten Bima akan mengalami perubahan secara signifikan dengan ditandai oleh:

- Kabupaten Bima yang **maju** ditandai dengan adanya kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan lahir dan batin. Aspek lahiriah, peningkatan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Aspek batiniah ditandai dengan meningkatnya penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pembangunan daerah, semakin mantapnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat, serta meningkatnya ketahanan sosial budaya.
- Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bima yang **sejahtera** ditandai dengan adanya perkembangan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dan meningkatnya kesejahteraan, kemakmuran serta kebahagiaan lahir batin. Meningkatnya penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pembangunan daerah, serta semakin mantapnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan ditandai oleh dua kondisi pokok yaitu kondisi pendapatan masyarakat cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan kondisi kehidupan kemasyarakatan yang bebas dari prasangka SARA dan gangguan-gangguan Kamtibmas. Kedua kondisi tersebut diukur berdasarkan peningkatan dalam Pendapatan per Kapita; Angka Kemiskinan; Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan *Crime Index*. Realitas kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan, ketimpangan antar wilayah, ketimpangan alokasi sumber daya, penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu aspek gangguan terhadap rasa keadilan masyarakat. Reaksi-reaksi sosial kemasyarakatan perlu ditanggapi dan dijadikan sebagai salah satu perwujudan rasa keadilan masyarakat. Pengukurannya dapat digunakan indikator seperti: tingkat layanan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas publik, tingkat layanan penyediaan modal bagi masyarakat.
- Masyarakat Bima yang **mandiri** ditandai dengan peningkatan kapasitas penalaran dan fisik manusia yang diukur berdasarkan perubahan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*), yang mencakup: Tingkat Pendidikan Penduduk; Tingkat Partisipasi Sekolah; Daya Serap Lembaga Pendidikan Formal; Usia Harapan Hidup Penduduk; Lama Hari Sakit Penduduk; Status Gizi Balita; Tingkat Kematian Bayi dan Ibu Hamil dan Nisbah Sarana Kesehatan per Penduduk. Berkaitan dengan derajat otonomi fiskal, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan otonominya berdasarkan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah, derajat otonomi fiskal diukur berdasarkan perubahan Indeks Kemampuan Rutin yaitu proporsi dan kontribusi penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah dan penerimaan yang berasal dari pemerintah Propinsi dan Pusat.
- Kabupaten Bima yang **bermartabat** ditandai dengan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkepribadian luhur dalam segala aspek kehidupan
- Kabupaten Bima yang **religius** ditandai dengan adanya kemajuan dan peningkatan dalam kehidupan beragama, dimana Islam yang merupakan agama mayoritas di wilayah ini dijadikan landasan norma kemasyarakatan untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memperhatikan dan menjaga kerukunan hidup dengan umat beragama lain. Peningkatan aspek batiniah dilaksanakan dengan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pembangunan daerah dan semakin mantapnya keimanan dan ketaqwaan

masyarakat. Hal ini dapat diukur dengan berkurangnya tingkat kejahatan pada masyarakat dalam berbagai bentuk, terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, dan terciptanya situasi kondusif untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat;

- Pemerintah Kabupaten Bima berupaya untuk meningkatkan **penyelenggaraan pemerintahan yang baik** sebagai sebuah komitmen dan keinginan pada suatu kondisi dimana seluruh derap langkah, aktivitas, dan manajemen pemerintahan di Kabupaten dikelola secara jujur, terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan masyarakat demi terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Terdapat 10 (sepuluh) prinsip tata pemerintahan yang baik menurut Kementerian PAN RI adalah meliputi: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, kesetaraan, wawasan ke depan, efektifitas dan efisiensi, profesionalisme, akuntabilitas, dan pengawasan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah terwujudnya supermasi hukum sebagai kondisi ideal di mana penyelenggara daerah maupun seluruh komponen masyarakat menjunjung tinggi, menghormati dan taat hukum. Terwujudnya kedaulatan rakyat dimana rakyat secara terhormat terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan sosial kemasyarakatan, untuk menentukan masa depannya yang baik, dalam prinsip pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat.
- Dalam upaya untuk mewujudkan **pertanian berkelanjutan**, diharapkan agar hasil-hasil produksi pertanian masyarakat memiliki daya saing tinggi pada perdagangan nasional dan internasional, dari segi kualitas dan kuantitas sehingga mampu mengangkat harkat hidup rakyat. Hal ini didukung oleh adanya inovasi teknologi pertanian dan diversifikasi produksi pertanian sebagai modal dasar peningkatan perekonomian rakyat (agro industri dan agro marketing).
- **Pembangunan berwawasan lingkungan** yang mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan masa kini dengan tetap memperhatikan dan menjamin ketersediaan sumberdaya untuk generasi mendatang.

## B. Misi

Misi pembangunan sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bima dirumuskan sebagai berikut:

1. Misi mewujudkan masyarakat Bima yang maju, sejahtera, mandiri, dan bermartabat dilaksanakan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan standar pelayanan minimum bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung, peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dalam bidang permukiman dan prasarana wilayah, peningkatan SDM yang berkualitas, meningkatkan keamanan dan ketertiban penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah untuk menciptakan suasana yang kondusif demi keberhasilan pembangunan.
2. Misi mewujudkan masyarakat Bima yang religius melalui peningkatan kesadaran, pemahaman, pendalaman, dan pengamalan keagamaan.
3. Misi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan penerapan 10 (sepuluh) prinsipnya sebagai kerangka pelaksanaan penetapan kebijakan dan pelayanan publik, penataan lembaga-lembaga pemerintahan, meningkatkan kreatifitas dan profesionalitas aparat pemerintahan daerah, mengoptimalkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam proses pembangunan daerah.
4. Misi mewujudkan Kabupaten Bima yang maju dalam pertanian berkelanjutan dilaksanakan dengan mendorong inovasi teknologi pertanian modern yang tepat guna, berdaya guna, dan didukung oleh SDM yang handal dalam bidang pertanian dan pengolahan hasil produksi pertanian secara berkelanjutan
5. Misi mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dilaksanakan dengan rehabilitasi dan penanganan kerusakan lingkungan darat dan pantai dalam rangka pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan SDA dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

## **V. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH**

### **A. Arah Pembangunan Jangka Panjang**

Arah pembangunan daerah merupakan bagian yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar pembangunan yang akan ditempuh sebagai penjabaran dari visi dan misi yang dapat menjadi kriteria untuk menyeleksi dan menyaring perumusan strategi dan program pembangunan untuk jangka menengah. Perumusan arah pembangunan jangka panjang memperhatikan dan mempertimbangkan semua aspek kehidupan dan kebutuhan masyarakat dari semua wilayah dan golongan masyarakat.

Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Bima tahun 2006-2025 dirumuskan sebagai berikut:

#### **1. Agenda Perwujudan Masyarakat Sejahtera dan Mandiri**

##### **a. Penanggulangan kemiskinan**

1. Peningkatan kemampuan SDM dan permodalan usaha ekonomi non formal.
  - Meningkatkan produktivitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan, memperluas peluang kepemilikan faktor-faktor produksi.
  - Peningkatan iklim yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan menengah
2. Pengembangan struktur ekonomi menuju keseimbangan struktur pertanian dan non pertanian, dengan strategi pencapaian
3. Pengurangan beban pengeluaran kelompok masyarakat miskin dalam mengakses kebutuhan dasar dan infrastruktur kegiatan sosial ekonomi. Arah kebijakan ini dapat diwujudkan melalui strategi pencapaian seperti
  - Pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana berdasarkan keadaan dan kebutuhan masyarakat untuk peningkatan pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan air bersih sesuai standar pelayanan minimum serta untuk membuka isolasi wilayah.
  - Penyempurnaan dan peningkatan infrastruktur untuk mendukung proses transformasi sosial ekonomi antar pelaku dalam rangka penanggulangan kemiskinan
4. Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi serta peningkatan kemampuan profesional tenaga pendidik, dengan strategi
  - Memperkuat lembaga pendidikan formal dan non formal
  - Meningkatkan ketrampilan dan penguasaan teknologi tepat guna
  - Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai kebijakan peningkatan pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat

##### **b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat**

1. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dan menjamin kesempatan bekerja dan berusaha serta perlindungan hak-hak konsumen.
2. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing dengan membuka kesempatan kerja dan berusaha yang mudah bagi segenap

- masyarakat serta menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif.
3. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan memberikan peluang usaha yang seluas-luas terutama pengusaha lokal.
  4. Memperkuat struktur ekonomi daerah dengan mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta, dan BUMD, serta antara usahawan besar, menengah, dan kecil.
  5. Menyehatkan badan usaha milik daerah yang kegiatannya berkaitan dengan kepentingan umum.
  6. Penciptaan iklim yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya hubungan bisnis dan kemitraan antara kelompok swadaya, asosiasi, pedagang, investor dan para penyedia jasa, dengan strategi yang ditempuh adalah :
    - Menciptakan peluang usaha serta peluang kerjasama bagi semua pihak dalam rangka mempercepat pembangunan daerah dan penanggulangan kemiskinan.
    - Meningkatkan pengolahan hasil produksi pertanian menjadi barang setengah jadi dan barang jadi
  7. Membangun prasarana dan sarana dasar sosial dan ekonomi masyarakat
    - Penyelenggaraan pembangunan wilayah berbasiskan pembangunan desa dan kecamatan
    - Pembangunan prasarana dan sarana wilayah berdasarkan keadaan dan kebutuhan masyarakat untuk membuka isolasi daerah
  8. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial budaya sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.
  9. Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan prasarana dan sarana, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi untuk memanfaatkan sumber daya alam dan mempercepat pertumbuhan potensi andalan masing-masing wilayah kecamatan.
  10. Mengembangkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang harmonis serta mampu menjamin terciptanya keadilan dan rasa aman bagi semua pihak
    - Menciptakan sistem komunikasi yang efektif di antara pihak – pihak yang terkait di dalam masyarakat
- c. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
1. Peningkatan kualitas lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pengembangan pendidikan:
  2. Peningkatan kualitas aparatur daerah dengan memperbaiki prosedur tetap dalam mendukung profesionalisme kerja dan memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi kerja.
  3. Meningkatkan fungsi dan keprofesionalan birokrasi dalam rangka melayani masyarakat, meningkatkan akuntabilitasnya dalam mengelola kekayaan negara secara transparan, bersih, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

4. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan yang didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan serta peralatan medis yang memadai.
  5. Membantu dan memberikan peluang bagi berdiri dan berkembangnya RSU swasta untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
  6. Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui peningkatan kualitas guru agama yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
  7. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup umat beragama baik intern umat beragama, antar umat beragama maupun antara umat beragama dengan pemerintah.
  8. Meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya termasuk penyempurnaan kualitas pelaksanaan ibadah yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
  9. Meningkatkan peranan dan fungsi tokoh agama, lembaga-lembaga keagamaan dalam menunjang pembangunan daerah.
- d. Pembangunan ketenagakerjaan  
Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan antara lain untuk menanggulangi tingginya tenaga kerja yang menganggur, rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja, serta belum memadainya perlindungan terhadap tenaga kerja termasuk tenaga kerja di luar negeri.
1. Penataan Kelembagaan Ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya peningkatan jaringan kerja dan perangkat hukum bagi perlindungan dan keselamatan serta kesehatan kerja
  2. Peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan
  3. Peningkatan kapasitas tenaga kerja
- e. Pembangunan Pedesaan
1. Penyediaan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dalam memudahkan akses masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi
  2. Peningkatan akses permodalan bagi usaha menengah, kecil dan mikro pedesaan melalui pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro tingkat desa
  3. Mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas dengan merangsang pertumbuhan aktivitas ekonomi non pertanian (industri pedesaan dan jasa penunjang), diversifikasi usaha pertanian ke arah komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi
  4. Memperkuat keterkaitan (*linkages*) kawasan perkotaan dengan pedesaan
  5. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk pertanian
  6. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitasnya baik sebagai insan maupun sebagai sumberdaya pembangunan
  7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi hak dasar atas pelayanan pendidikan dan kesehatan
  8. Mengembangkan praktek budidaya pertanian dan usaha non pertanian yang ramah pertanian
  9. Meningkatkan peran serta dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan.
- f. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
  2. Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya
  3. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak rawan sosial
  4. Meningkatkan kualitas hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial
  5. Mengembangkan, menyetarakan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial
  6. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial budaya
  7. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.
- g. Percepatan pembangunan infrastruktur
1. Peningkatan infrastruktur yang menunjang konservasi sumberdaya air
  2. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi baik darat, laut maupun udara
- h. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah
1. Memperluas akses kaum perempuan ke sumberdaya produktif untuk pengembangan usaha, seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi serta akses masyarakat ke pelayanan publik dan pasar
  2. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dalam rangka usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
- i. Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga
1. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, dan meningkatkan program keluarga berencana
  2. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan potensi, bakat dan minat serta memberikan kesempatan dan kebebasan berorganisasi sebagai wahana pendewasaan diri
  3. Menumbuhkembangkan budaya olahraga di kalangan masyarakat
  4. Menumbuhkembangkan olahraga secara sistematis, komprehensif dan profesional
- j. Peningkatan ketahanan sosial budaya
1. Memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, minuman keras, perjudian, pornografi dan pornoaksi
  2. Mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya leluhur yang sesuai dengan ajaran agama dalam rangka peningkatan kualitas budaya masyarakat

3. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian dan moralitas masyarakat Kabupaten Bima
4. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam kesenian, untuk mencapai sasaran sebagai pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan dengan mengacu pada etika, moral, estetika dan agama
5. Melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional
6. Menjadikan kesenian dan budaya tradisional daerah sebagai wahana bagi pengembangan pariwisata daerah

## **2. Agenda Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama**

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui peningkatan kualitas guru-guru agama yang didukung oleh sarana dan prasarana pendidikan keagamaan yang memadai.
- b. Meningkatkan akses untuk melaksanakan kegiatan keagamaan dengan dukungan sarana dan prasarana peribadatan yang memadai.
- c. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup umat beragama baik intern umat beragama, antar umat beragama maupun antara umat beragama dengan pemerintah.
- d. Meningkatkan penyempurnaan kualitas pelaksanaan ibadah yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
- e. Meningkatkan peran dan fungsi tokoh agama, lembaga-lembaga keagamaan dalam menunjang terselenggaranya kehidupan beragama yang berkualitas.
- f. Memantapkan forum kerjasama sosial kemasyarakatan bidang keagamaan.

## **3. Agenda Kepemerintahan Yang Baik**

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan guna mewujudkan *good governance*
  1. Penetapan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembangunan
  2. Peningkatan pola perencanaan pembangunan partisipatif
- b. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, bertanggungjawab, yang mampu mendukung pembangunan daerah
  1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
  2. Pengembangan data base kepegawaian dan perencanaan karier pegawai
- c. Terciptanya supremasi hukum dan meningkatkan kapasitas kelembagaan hukum daerah dalam pengawasan pembangunan
  1. Penentuan peraturan daerah yang menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan
  2. Membersihkan aparatur daerah dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
  3. Meningkatkan peran lembaga dan aparat peradilan dalam sistem peradilan yang terbuka
  4. Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum
  5. Peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam hukum
  6. Penegakkan Hak Anak, Hak-hak Perempuan, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

- d. Penataan kelembagaan pemerintahan daerah
  1. Penataan lembaga pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* (transparan, akuntabel, obyektif dan partisipatif)
  2. Pembagian kewenangan yang jelas antar SKPD
  3. Peningkatan fungsi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan
  4. Memperkuat lembaga pendidikan formal dan non formal
  5. Mengadakan analisis kebutuhan berbagai aspek pengembangan kapasitas (*capacity building*)
  6. Penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan

#### **4. Agenda Pertanian Berkelanjutan**

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian dalam arti luas dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan penggunaan lahan yang sesuai peruntukannya.
- b. Peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian dalam arti luas dengan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian baik dalam skala kecil (rumah tangga) maupun skala besar melalui pelibatan sektor swasta yang berorientasi pasar.
- c. Meningkatkan akses masyarakat tani terhadap sumber-sumber permodalan baik itu dengan pelibatan lembaga keuangan, bank maupun non bank.
- d. Meningkatkan akses masyarakat tani terhadap pasar domestik regional, nasional, maupun internasional.
- e. Mempertahankan lahan pertanian yang ada untuk pembangunan pertanian berkelanjutan.

#### **5. Agenda Pembangunan Berwawasan Lingkungan**

Peningkatan sumberdaya manusia/kependudukan

- a. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
- b. Peningkatan pengetahuan, pendidikan, keterampilan, dan kemampuan menguasai berbagai teknologi dan informasi mengenai pembangunan berwawasan lingkungan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah
- c. Peningkatan kreatifitas, profesionalisme, dan kemampuan aparat pegawai Pemda dalam pencegahan, pengelolaan, dan penanggulangan masalah lingkungan hidup

Peningkatan sumberdaya sosial/kelembagaan

- a. Peningkatan koordinasi, pengendalian, dan pengawasan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
- b. Penataan ruang wilayah untuk mendukung keberhasilan pembangunan berwawasan lingkungan berdasarkan kesesuaian lahan dan daya dukung lingkungan
- c. Penataan kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup

Peningkatan sumberdaya alam/lingkungan

- a. Pengembangan dan peningkatan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan Hidup
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan, konservasi, dan rehabilitasi sumberdaya alam



- c. Pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup

Peningkatan sumberdaya buatan/ekonomi

- a. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan atau kapasitas berbagai sarana prasarana, teknologi, permodalan yang berdaya guna dalam pengembangan sumberdaya alam
- b. Pengembangan sistem informasi tentang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan

## **B. Prioritas Pembangunan Daerah**

Untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bima dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang, prioritas pembangunan Kabupaten Bima perlu ditetapkan sebagai bagian dari arah pembangunan jangka panjang daerah.

Prioritas pembangunan Kabupaten Bima dalam kurun waktu 2006-2025 adalah sebagai berikut :

### **1. Agenda Perwujudan Masyarakat Sejahtera dan Mandiri**

- a. Penanggulangan kemiskinan
  1. Peningkatan kemampuan SDM dan permodalan usaha ekonomi non formal.
    - Meningkatkan produktivitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan, memperluas peluang kepemilikan faktor-faktor produksi.
    - Peningkatan iklim yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan menengah
  2. Pengembangan struktur ekonomi menuju keseimbangan struktur pertanian dan non pertanian, dengan strategi pencapaian ;
  3. Pengurangan beban pengeluaran kelompok masyarakat miskin dalam mengakses kebutuhan dasar dan infrastruktur kegiatan sosial ekonomi. Arah kebijakan ini dapat diwujudkan melalui strategi pencapaian seperti ;
    - Pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana berdasarkan keadaan dan kebutuhan masyarakat untuk peningkatan pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan air bersih sesuai standar pelayanan minimum serta untuk membuka isolasi wilayah.
    - Penyempurnaan dan peningkatan infrastruktur untuk mendukung proses transformasi sosial ekonomi antar pelaku dalam rangka penanggulangan kemiskinan
  4. Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi serta peningkatan kemampuan profesional tenaga pendidik, dengan strategi;
    - Memperkuat lembaga pendidikan formal dan non formal
    - Meningkatkan ketrampilan dan penguasaan teknologi tepat guna
    - Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai kebijakan peningkatan pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat
- b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
  1. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dan menjamin kesempatan bekerja dan berusaha serta perlindungan hak-hak konsumen.

2. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing dengan membuka kesempatan kerja dan berusaha yang mudah bagi segenap masyarakat serta menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif.
  3. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan memberikan peluang usaha yang seluas-luas terutama pengusaha lokal.
  4. Memperkuat struktur ekonomi daerah dengan mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta, dan BUMD, serta antara usahawan besar, menengah, dan kecil.
  5. Menata kembali manajemen pengelolaan badan usaha milik daerah yang kegiatannya berkaitan dengan kepentingan umum.
  6. Penciptaan iklim yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya hubungan bisnis dan kemitraan antara kelompok swadaya, asosiasi, pedagang, investor dan para penyedia jasa, dengan strategi yang ditempuh adalah :
    - Menciptakan peluang usaha serta peluang kerjasama bagi semua pihak dalam rangka mempercepat pembangunan daerah dan penanggulangan kemiskinan.
    - Meningkatkan pengolahan hasil produksi pertanian menjadi barang setengah jadi dan barang jadi
  7. Membangun prasarana dan sarana dasar sosial dan ekonomi masyarakat
    - Penyelenggaraan pembangunan wilayah berbasiskan pembangunan desa dan kecamatan
    - Pembangunan prasarana dan sarana wilayah berdasarkan keadaan dan kebutuhan masyarakat untuk membuka isolasi daerah
  8. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial budaya sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.
  9. Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan prasarana dan sarana, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi untuk memanfaatkan sumber daya alam dan mempercepat pertumbuhan potensi andalan masing-masing wilayah kecamatan.
  10. Mengembangkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang harmonis serta mampu menjamin terciptanya keadilan dan rasa aman bagi semua pihak
    - Menciptakan sistem komunikasi yang efektif di antara pihak – pihak yang terkait di dalam masyarakat
- c. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
1. Peningkatan kualitas lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pengembangan pendidikan:
  2. Peningkatan kualitas aparatur daerah dengan memperbaiki prosedur tetap dalam mendukung profesionalisme kerja dan memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi kerja.
  3. Meningkatkan fungsi dan keprofesionalan birokrasi dalam rangka melayani masyarakat, meningkatkan akuntabilitasnya dalam mengelola kekayaan negara secara transparan, bersih, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

4. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan yang didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan serta peralatan medis yang memadai.
5. Membantu dan memberikan peluang bagi berdiri dan berkembangnya RSU swasta untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

## **2. Agenda Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama**

1. Peningkatan kualitas pendidikan agama melalui peningkatan kualitas guru-guru agama dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan yang memadai.
2. Kemudahan akses bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya termasuk penyempurnaan kualitas pelaksanaan ibadah yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
3. Peningkatan dan pemantapan kerukunan hidup umat beragama baik intern umat beragama, antar umat beragama maupun antara umat beragama dengan pemerintah.
4. Peningkatan penyempurnaan kualitas pelaksanaan ibadah yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
5. Peran aktif dan optimalisasi fungsi tokoh-tokoh agama, lembaga-lembaga keagamaan dalam menunjang terselenggaranya kehidupan beragama yang berkualitas.
6. Peningkatan dan pemantapan program-program dalam forum kerjasama sosial kemasyarakatan bidang keagamaan.

## **3. Agenda Kepemerintahan Yang Baik**

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan guna mewujudkan *good governance*
  1. Penetapan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembangunan
  2. Peningkatan pola perencanaan pembangunan partisipatif
- b. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, bertanggungjawab, yang mampu mendukung pembangunan daerah
  1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
  2. Pengembangan data base kepegawaian dan perencanaan karier pegawai
- c. Terciptanya supremasi hukum dan meningkatkan kapasitas kelembagaan hukum daerah dalam pengawasan pembangunan
  1. Penentuan peraturan daerah yang menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan;
  2. Membersihkan aparatur daerah dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
  3. Meningkatkan peran lembaga dan aparat peradilan dalam sistem peradilan yang terbuka;
  4. Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum;
  5. Peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam hukum
  6. Penegakkan Hak Anak dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- d. Penataan kelembagaan pemerintahan daerah
  1. Penataan lembaga pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* (transparan, akuntabel, obyektif, dan partisipatif).

2. Pembagian kewenangan yang jelas antar SKPD
3. Peningkatan fungsi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan
4. Memperkuat lembaga pendidikan formal dan non formal
5. Mengadakan analisis kebutuhan berbagai aspek pengembangan kapasitas (*capacity building*)
6. Penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan

#### 4. Agenda Pertanian Berkelanjutan

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan penggunaan lahan yang sesuai peruntukannya
  1. Memfasilitasi kemitraan antar pelaku dalam bidang pertanian mulai dari budidaya, prosesing, sampai kepada pemasaran hasil
  2. Penanganan hasil pertanian secara berkelanjutan untuk memenuhi permintaan pasar
  3. Perluasan wilayah distribusi hasil pertanian
  4. Diversifikasi produk pertanian
  5. Intensifikasi pertanian
  6. Mekanisasi pertanian
  7. Pemantapan kawasan sentra produksi
  8. Penyediaan rencana induk pengembangan pertanian
  9. Optimalisasi pemanfaatan lahan kritis secara optimal dengan menggunakan teknologi tepat guna
- b. Peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian dengan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian baik dalam skala kecil (rumah tangga) maupun skala besar melalui pelibatan sektor swasta
  1. Peningkatan peran industri pengolahan hasil pertanian
  2. Peningkatan kerjasama dan kemitraan para pelaku pengembangan industri pengolahan hasil pertanian
  3. Pengembangan lembaga pengelolaan pertanian tradisional
- c. Meningkatkan akses masyarakat tani terhadap sumber-sumber permodalan baik itu dengan pelibatan lembaga keuangan, bank maupun non bank.
  1. Peningkatan kapasitas petani dalam pengelolaan usaha tani yang berwawasan lingkungan
  2. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat petani untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengelolaan usaha tani
  3. Pengembangan kapasitas petani dalam pengelolaan produk pertanian, distribusi, dan pemasaran hasil pertanian
- d. Meningkatkan akses masyarakat tani terhadap pasar domestik regional, nasional, maupun internasional
  1. Penataan sistem informasi pemasaran hasil pertanian skala regional, nasional, maupun internasional
  2. Peningkatan strategi pemasaran hasil pertanian
- e. Pembangunan ketenagakerjaan  
 Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan antara lain untuk menanggulangi tingginya tenaga kerja yang menganggur, rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja, serta belum memadainya

perlindungan terhadap tenaga kerja termasuk tenaga kerja di luar negeri.

1. Penataan kelembagaan ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya peningkatan jaringan kerja dan perangkat hukum bagi perlindungan dan keselamatan serta kesehatan kerja;
2. Peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan
3. Peningkatan kapasitas tenaga kerja

f. Pembangunan Pedesaan

1. Penyediaan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dalam memudahkan akses masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi;
2. Peningkatan akses permodalan bagi usaha menengah, kecil dan mikro pedesaan melalui pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro tingkat desa;
3. Mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas dengan merangsang pertumbuhan aktivitas ekonomi non pertanian (industri pedesaan dan jasa penunjang), diversifikasi usaha pertanian ke arah komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi;
4. Memperkuat keterkaitan (*linkages*) kawasan perkotaan dengan pedesaan;
5. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk pertanian;
6. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitasnya baik sebagai insan maupun sebagai sumberdaya pembangunan;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi hak dasar atas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
8. Mengembangkan praktek budidaya pertanian dan usaha non pertanian yang ramah pertanian;
9. Meningkatkan peran serta dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan.

g. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
2. Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat dan kelompok rentan sosial lainnya;
3. Meningkatkan kualitas hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial;
4. Mengembangkan, menyeraskan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial;
5. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial budaya;
6. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.

h. Percepatan pembangunan infrastruktur

1. Peningkatan infrastruktur yang menunjang konservasi sumberdaya air
2. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi baik darat, laut maupun udara

i. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah

1. Memperluas akses kaum perempuan ke sumberdaya produktif untuk pengembangan usaha, seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi serta akses masyarakat ke pelayanan publik dan pasar;
  2. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dalam rangka usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
- j. Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga
1. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, dan meningkatkan program keluarga berencana;
  2. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan potensi, bakat dan minat serta memberikan kesempatan dan kebebasan berorganisasi sebagai wahana pendewasaan diri
  3. Menumbuhkembangkan budaya olah raga di kalangan masyarakat
  4. Menumbuhkembangkan olah raga secara sistematis, komprehensif dan profesional.
- k. Peningkatan ketahanan sosial budaya
1. Memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, minuman keras, perjudian, pornografi dan pornoaksi;
  2. Mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya leluhur yang sesuai dengan ajaran agama dalam rangka peningkatan kualitas budaya masyarakat;
  3. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian dan moralitas masyarakat Kabupaten Bima;
  4. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam kesenian, untuk mencapai sasaran sebagai pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan dengan mengacu pada etika, moral, estetika dan agama;
  5. Melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional ;
  6. Menjadikan kesenian dan budaya tradisional daerah sebagai wahana bagi pengembangan pariwisata daerah.

## **5. Agenda Pembangunan Berwawasan Lingkungan**

Secara makro, agenda pembangunan berwawasan lingkungan menerapkan prinsip dan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan yang mengandung 3 (tiga) aspek keberlanjutan, yaitu: ekonomi, sosial/kependudukan, dan lingkungan yang terkait satu dengan yang lainnya. Agar agenda pembangunan berwawasan lingkungan dapat tercapai, diperlukan 4 jenis sumberdaya utama pembangunan daerah, yaitu: sumberdaya alam/lingkungan, sumberdaya buatan/ekonomi, sumberdaya manusia, dan sumberdaya sosial/kelembagaan. Pembangunan berkelanjutan lebih banyak diutamakan dalam pemberdayaan sumberdaya manusia/kependudukan dan sumberdaya sosial/kelembagaan, bukan hanya dengan mengeksploitasi sumberdaya alam dan merangsang secara berlebihan penggunaan sumberdaya buatan. Ini dimaksudkan untuk mengotimalkan penggunaan sumberdaya alam yang ada untuk generasi sekarang, dengan tetap memperhatikan kebutuhan sumberdaya alam untuk generasi mendatang.

Berdasarkan 4 (empat) jenis sumberdaya utama pembangunan berwawasan lingkungan tersebut di atas, kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan diarahkan untuk mencapai suatu keadaan dimana masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bima dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan, kelestarian alam, meningkatkan kesejahteraan dan berkelanjutan dalam kualitas lingkungan hidup yang semakin baik dan sehat. Secara sistematis, arah kebijakan dalam agenda pembangunan berwawasan lingkungan dijabarkan sebagai berikut:

#### Peningkatan sumberdaya manusia/kependudukan

- a. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
  1. Peningkatan jumlah dan kualitas anggota masyarakat yang peduli dan mampu terhadap pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.
  2. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup melalui pendekatan keagamaan, adat dan budaya.
  3. Pembentukan lembaga yang melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
  4. Perlindungan hak-hak adat dan ulayat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
  5. Pengkajian sosial-ekonomi dan budaya masyarakat adat dan lokal; pemafaatan kearifan tradisional dalam pemeliharaan lingkungan hidup.
  6. Perlindungan terhadap teknologi tradisional yang ramah lingkungan.
- b. Peningkatan pengetahuan, pendidikan, keterampilan, dan kemampuan menguasai berbagai teknologi dan informasi mengenai pembangunan berwawasan lingkungan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah
- c. Peningkatan kreatifitas, profesionalisme, dan kemampuan aparat pegawai Pemda dalam pencegahan, pengelolaan, dan penanggulangan masalah lingkungan hidup

#### Peningkatan sumberdaya sosial/kelembagaan

- a. Peningkatan koordinasi, pengendalian, dan pengawasan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
  1. Peningkatan kreatifitas, profesionalisme, dan kemampuan koordinasi pegawai Pemda melalui diklat dan studi banding
  2. Penataan hubungan kerjasama atau kemitraan usaha yang saling membutuhkan dan menguntungkan antar berbagai lembaga/kelompok pelaku pembangunan sesuai konsep pembangunan berkelanjutan
- b. Penataan ruang wilayah untuk mendukung keberhasilan pembangunan berwawasan lingkungan berdasarkan kesesuaian lahan dan daya dukung lingkungan
  1. Peningkatan sistem pengelolaan rencana tata ruang
  2. Penataan fungsi penggunaan lahan sesuai peruntukannya
  3. Pengembangan kawasan terpadu
  4. Pembukaan kawasan terisolir
- c. Penataan kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup

1. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sumberdaya alam.
2. Penetapan kebijakan yang membuka peluang akses dan kontrol masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan Perda yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi alam.
4. Pengakuan kelembagaan adat dan lokal dalam kepemilikan dan pengelolaan sumberdaya alam.
5. Pengembangan pelaksanaan perjanjian internasional dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
6. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
7. Pelaksanaan program-program sukarela seperti sistem manajemen dan kinerja lingkungan (ISO 14000 dan ekolabeling) pada sebanyak mungkin perusahaan industri dan jasa agar dapat bersaing di tingkat internasional.

#### Peningkatan sumberdaya alam/lingkungan

- a. Pengembangan dan peningkatan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup
  1. Inventarisasi dan evaluasi potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup baik di darat maupun di laut.
  2. Evaluasi potensi sumber daya hutan, air, laut dan tambang.
  3. Pengkajian neraca sumberdaya alam dan penyusunan PDRB hijau secara bertahap.
  4. Pendataan kawasan ekosistem yang rentan terhadap kerusakan, termasuk wilayah kepulauan.
  5. Pendataan batas kawasan hutan, pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sistem informasi sumberdaya alam dan lingkungan
  6. Peningkatan akses informasi kepada masyarakat
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan, konservasi, dan rehabilitasi sumberdaya alam
  1. Pengkajian kembali kebijakan pengelolaan, konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam.
  2. Pengelolaan sumberdaya hutan dan sumberdaya air dengan pendekatan daerah aliran sungai dalam kerangka penataan ruang.
  3. Pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada wilayah pesisir, dan lahan bekas pertambangan.
  4. Penerapan sistem disinsentif dalam bentuk tarip yang progresif dan rasional untuk melindungi sumberdaya alam.
  5. Pengelolaan dan pengembangan keanekaragaman hayati darat dan perairan, baik secara insitu maupun eksitu, serta perekayasa genetika.
  6. Pengembangan teknologi penggunaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan termasuk teknologi yang terbaik, teknologi lokal, dan teknologi daur ulang yang tersedia.
  7. Pengembangan industri pemanfaatan flora, fauna serta biota laut lainnya yang memiliki keunggulan komperatif.
  8. Rasionalisasi dan restruktursasi industri berbasis sumberdaya alam untuk menjamin keberlanjutan daya dukung sumberdaya alam, dan pengembangan jasa pariwisata yang berwawasan lingkungan di berbagai kawasan yang memiliki ekosistem berciri khusus.



- c. Pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup
  - 1. Pengembangan teknologi yang berwawasan lingkungan khususnya teknologi tradisional dengan pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya hutan, dan industri yang ramah lingkungan.
  - 2. Penetapan indeks dan baku mutu lingkungan.
  - 3. Pengembangan teknologi pengelolaan limbah rumah tangga, industri dan transportasi.
  - 4. Pengintegrasian biaya pengembangan kelembagaan pendanaan pengelolaan lingkungan hidup.
  - 5. Penjaminan terjadinya alih kapasitas.
  - 6. Pengendalian pencemaran air tanah, udara dan pengawasan serta evaluasi standar mutu lingkungan.

Peningkatan sumberdaya buatan/ekonomi

- a. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan atau kapasitas berbagai sarana prasarana, teknologi, permodalan yang berdaya guna dalam pengembangan sumberdaya alam
  - 1. Peningkatan dan pengelolaan kemampuan sarana prasarana fisik seperti jaringan jalan
  - 2. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dari generasi ke generasi dengan melakukan prinsip-prinsip berkelanjutan.
  - 3. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaannya dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
  - 4. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup serta pembangunan berkelanjutan.
- c. Pengembangan sistem informasi tentang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan
  - 1. Penataan sistem informasi tentang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan
  - 2. Peningkatan fasilitas pendukung sistem informasi daerah

### **C. Strategi Makro Pencapaian Pembangunan 20 Tahun**

Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan pembangunan daerah, visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dalam 4 (empat) agenda pokok, strategi makro pencapaian pembangunan 20 tahun mendatang dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Agenda Perwujudan Masyarakat Sejahtera dan Mandiri**

- a. Peningkatan kualitas SDM
- b. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana dasar yang tersedia untuk menunjang proses pembangunan daerah
- c. Pengelolaan potensi sumber-sumber perekonomian daerah yang mendukung peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan
- d. Pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah secara intensif mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, untuk menurunkan angka kemiskinan
- e. Menjalin kemitraan dengan seluruh stakeholders yang terkait dengan perekonomian daerah

- f. Meningkatkan aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana fisik, ekonomi, dan sosial
  - g. Meningkatkan ketertiban dan kerekatan sosial
- 2. Agenda Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama**
- a. Peningkatan kualitas pendidikan untuk guru-guru agama melalui pendidikan formal dan informal.
  - b. Meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan masyarakat dengan penyebarluasan informasi dakwah keagamaan.
  - c. Menciptakan iklim yang kondusif untuk kelancaran peningkatan pemahaman, pendalaman, dan pengamalan agama bagi masyarakat.
  - d. Peningkatan peran dan fungsi tokoh-tokoh agama, lembaga-lembaga keagamaan dalam menunjang pembangunan daerah.
  - e. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan keagamaan.
  - f. Pembinaan kerukunan hidup umat beragama baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah.
  - g. Pembinaan forum kerjasama sosial kemasyarakatan bidang keagamaan.
- 3. Agenda Kepemerintahan Yang Baik**
- a. Penataan kembali lembaga pemerintahan daerah dan lembaga peradilan daerah
  - b. Optimalisasi tugas pokok dan fungsi lembaga untuk sehingga tercipta suatu tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan bebas KKN dalam kerangka pelayanan prima
  - c. Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM)
  - d. Penerapan 10 (sepuluh) prinsip *good governance*
- 4. Agenda Pertanian Berkelanjutan**
- a. Penataan dan penguatan kelembagaan dan para pelaku dalam pengembangan sektor pertanian berkelanjutan
  - b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pengembangan produk pertanian
  - c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi
  - d. Peningkatan kualitas SDM
  - e. Mengintensifkan penelitian dan pengembangan produksi pertanian
  - f. Penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
- 5. Agenda Pembangunan Berwawasan Lingkungan**
- a. Optimalisasi penggunaan SDA secara berkelanjutan
  - b. Pengembangan iptek dan teknologi yang ramah lingkungan
  - c. Penegakan supremasi hukum tentang pembangunan berwawasan lingkungan
  - d. Pengembangan sistem informasi tentang lingkungan dan pembangunan berwawasan lingkungan

Pencapaian keadaan yang diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dengan mewujudkan Kabupaten Bima yang maju, sejahtera, mandiri, bermartabat, dan religius, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maju dalam pertanian berkelanjutan, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan tersebut, merupakan hasil rumusan perencanaan strategis jangka panjang yang menjalin keterkaitan antara aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, dan kelembagaan. Secara umum, keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang dituangkan dalam 5 (lima) Agenda Pembangunan

Daerah dapat dilihat dari beberapa indikator pencapaian kinerja sebagai berikut:

**1. Agenda Perwujudan Masyarakat Sejahtera dan Mandiri**

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan keagamaan untuk seluruh lapisan masyarakat.
- b. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
- c. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dengan tersedianya berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan berkualitas.
- d. Masyarakat pedesaan dapat memanfaatkan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tersedia
- e. Optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.
- f. Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya.

**2. Agenda Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama**

- a. Terwujudnya masyarakat sejahtera yang menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Terciptanya kerukunan hidup umat beragama baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah.
- c. Berfungsinya sarana dan prasarana keagamaan yang memadai dan berkualitas.
- d. Meningkatnya aktifitas keagamaan dalam menunjang terselenggaranya kehidupan beragama yang berkualitas.

**3. Agenda Pemerintahan Yang Baik**

- a. Optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
- b. Terwujudnya profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah yang menerapkan prinsip *good governance*.
- c. Terwujudnya supremasi hukum dengan meningkatnya kapasitas kelembagaan hukum daerah.
- d. Tertatanya kelembagaan pemerintahan daerah dengan diterapkannya PP 8/2003 tentang struktur kelembagaan daerah.
- e. Efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan dana pembangunan daerah.

**4. Agenda Pertanian Berkelanjutan**

- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi pertanian daerah.
- b. Meningkatnya nilai tambah hasil produksi pertanian dengan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian.
- c. Terwujudnya kondisi eksisting penggunaan lahan pertanian untuk mendukung pertanian berkelanjutan.
- d. Meningkatnya akses masyarakat tani terhadap pasar domestik regional, nasional, maupun internasional.

**5. Agenda Pembangunan Berwawasan Lingkungan**

- a. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan daerah yang tetap memperhatikan kaidah kelestarian lingkungan.
- b. Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan kapasitas berbagai sarana prasarana, teknologi, permodalan yang berdaya guna dalam pengembangan SDA.
- c. Terwujudnya penataan kelembagaan dan penegakan hukum dalam pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup.

- d. Tertatanya ruang wilayah untuk mendukung keberhasilan pembangunan berwawasan lingkungan berdasarkan kesesuaian lahan dan daya dukung lingkungan.

## Strategi Makro Pencapaian Pembangunan 20 tahun





## **VI. PENUTUP**

Sesuai amanat UU 25/2004, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bima telah mampu menformulasikan rumusan visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bima sebagai suatu komitmen bersama antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat untuk mengubah keadaan yang ada sekarang menjadi suatu lebih baik sesuai dengan yang telah direncanakan dalam 20 tahun mendatang. Keinginan ini telah dituangkan dalam 5 (lima) Agenda Pembangunan Daerah yaitu Agenda Perwujudan Masyarakat Sejahtera dan Mandiri, Agenda Peningkatan Pemahaman dan Pendalaman Agama, Agenda Kepemerintahan Yang Baik, Agenda Pertanian Berkelanjutan, dan Agenda Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Target pencapaian kelima agenda pembangunan ini perlu diupayakan secara maksimal untuk menjawab permasalahan pokok dan tantangan pembangunan daerah.

Diharapkan dengan adanya dokumen manajerial perencanaan pembangunan jangka panjang daerah ini, proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Kerja keras, komitmen, dan kerjasama seluruh stakeholders yang terlibat dalam pembangunan Kabupaten Bima merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bima.